

Buletin Wahana Komunikasi

Program MFP 99



Ministry of Forestry

DFID Department for International Development



KEHATI
INDONESIAN BIODIVERSITY FOUNDATION



Berbagai aktivitas dalam acara lokakarya RLPS di Bali 16-19 Desember 2008

Ada dua kunjungan lapang ke Bali dalam rangka MFP mendukung pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Kunjungan ke Lokasi HKM di Buleleng 16 Desember 2008 disajikan dalam edisi ini. Kunjungan ke hutan adat Tenganan, 7 Januari 2009 akan mengisi edisi berikutnya.

MFP dukung Dirjen RLPS untuk Lokakarya HKM

MFP mendukung lokakarya membangun Tata Hubungan Kerja Pelayanan penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan di Bali 16-19 Desember di hotel Segara Jimbaran.

Penyelenggaraan lokakarya adalah Dirjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, dimaksudkan untuk menguatkan fungsi layanan dephut dalam penyelenggaraan dan perluasan inisiatif hutan kemasyarakatan.

Hari pertama lokakarya ini dimulai dengan kunjungan ke lokasi HKM di kecamatan

Grogak Kabupaten Buleleng. Kadishut Buleleng setelah memberi sambutan dan disambung dialog antara 3 kelompok tani dan peserta lainnya yang hadir. Kunjungan ini memiliki arti penting bagi inisiatif HKM yang mencakup luas 150 ha yang telah dikelola oleh 100 KK petani sejak 1999 oleh petani setempat. Sedangkan verifikasi dan evaluasi tengah diproses oleh Menhut. Dari hasil kunjungan dan diskusi dengan petani di ketahui bahwa selain mereka berhasil menanam sengon, mahoni dan kemiri, palawija (kacang, jagung) pun tumbuh subur belakangan saat hutan tumbuh subur. Padahal sebelumnya kebutuhan ekonomi petani tak bisa

digantungkan dari palawija. Hutan telah “menyulap” daerah itu menjadi subur.

Fakta yang dijumpai di lapangan merupakan amunisi penting bagi pihak-pihak pengambil keputusan dan penyusun kebijakan untuk segera meresponnya. Karena setelah kunjungan lapang, lokakarya dan diskusi dilakukan pada hari ke dua.

Lokakarya dibuka dengan laporan Direktur Bina Perhutanan Sosial yang juga menjabat sebagai ketua panitia lokakarya ini. Sambutan Direktur Jendral Rehabilitasi Lahan Perhutanan Sosial melengkapi acara pembukaan ini.

Kesimpulan

Usulan sejumlah parapihak untuk pembentukan POKJA di kabupaten dan usulan parapihak yang terdiri dari NGOs untuk membentuk desk pelayanan pada dasarnya menyiratkan keinginan yang sama yaitu adanya penanganan khusus terhadap permohonan izin HKM dan Hutan Desa. Usulan kelompok NGOs mempunyai sifat "terobosan" dalam hal penetapan oleh Presiden (perpres).

Usulan Unit Pelaksana Teknis Dephut (BPDAS, BPKH) untuk meningkatkan anggaran dalam penataan areal kerja HKM dan Hutan Desa menyiratkan bahwa selama ini anggaran pada instansi-instansi tersebut untuk pengurusan HKM dan Hutan Desa adalah terbatas.

Keinginan Ditjen RLPS untuk membuat Tata Hubungan Kerja HKM dan Hutan Desa yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan masih memerlukan elaborasi di tingkat Departemen Kehutanan. Matrix tata hubungan kerja yang dicoba diturunkan dari Permen tentang HKM dan Hutan Desa perlu dibahas lebih lanjut.

Salah satu arahan Dirjen RLPS dalam sambutan pembukaan lokakarya perlu dijadikan rujukan, yaitu "bila perlu aturan yang ada direvisi". Se jauh mana revisi tersebut dibuat, akan ditentukan oleh "semangat pemberdayaan" dari para pengambil kebijakan.

lokakarya parapihak...



Dialog multipihak ini diharapkan dapat mempermudah realisasi HKM di Bali. Dialog dipandu Dani dari Inspirit Inc.

Presentasi parapihak: Dishut Lampung Barat, BPDAS Way Sekampung-seputih Lampung, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Palu, Dirjen Iuran Hasil Hutan, Ditjen BPK, LSM Damar Yogyakarta memberikan pemahaman terhadap masalah terkait HKM/hutan desa di wilayah masing-masing.

Diskusi dipandu INSPIRIT INC. yang hasilnya menjadi bahan bagi Tim Perumus merumuskan tata hubungan kerja untuk penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa.

Polemik seputar penyelenggaraan HKM adalah penatausahaan kayu dari areal HKM. Meski implikasi hukum dari ketidakberesan itu dipahami, namun fakta menunjukkan banyak areal HKM ketika diberikan masih banyak terdapat tegakan- yang bila

mengacu PP 55/07, kayu yang dipungut akan dikenai dana reboisasi. Lebih lanjut tim mengusulkan agar masing-masing instansi terlibat merumuskan fungsi-fungsinya sesuai P37 & P49 mulai dari tingkat Ditjen, Direktorat dan UPT.

Diakhir lokakarya terumuskan prioritas kerja sbb: Resolusi ditingkat kabupaten (yogya, Lampung dengan pembentukan POKJA. Di tingkat provinsi perlu di bangun standar perijinan (Bali dan Sultra), ditingkat UPT perlu percepatan penataan kerja areal HKM/ Hutan Desa, sementara NGO dan Universitas dapat memberi kajian untuk desk pelayanan HKM/Hutan Desa sebagai masukan pada pemerintah untuk penyusunan Perpres. Namun usulan yang terakhir ini masih menjadi perdebatan.

Galeri Photo Lokakarya Jimbaran 16-19 Desember 2008



Gambar baris 1: fasilitasi dan dialog dengan kelompok tani HKM di Buleleng. Baris 2 & 3: Peserta lokakarya aktif memberi input. Baris 4: Diskusi dan debat mewarnai proses dialog multipihak.